

## A. Buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Alwesius, 2022, “*Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Dan Teknik Pembuatan Akta Risalah Dalam Berbagai Mata Acara Rapat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amanat Anisitus, 1996, *Pembahasan Undnag-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 1998, *Produser Perencanaan: suatu PendekatanPraktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boediarto, M. Ali, 2005, *Kompilasi kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justisia, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efendi, Jonedi, Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Ginting, Jamin 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Dikutip dari, Habib Adjie, 2007,

*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.

Ikhsan Lubis, H., 2022, *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, Kencana, Jakarta.

Imaniyati, Neni Sri, 2009, "*Hukum Bisnis: telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*", Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Cet. III, Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta.

Lumban Tobing, G.H.S, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, dikutip dari Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Maha Karya

Pustaka, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum BPK*, Griya Media, Salatiga.

Purwosutjipto, H.M.N., 2009, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta.

Salim HS, H, 2023, "*Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh (Introduction To Remote Online Notary Law)*", Reka Cipta, Bandung.

Sampara, Said, 2011, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta.

Samudera, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

- Sastrawidjaja, Man Suparman, 2002 *“Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar”*, Cet. I, Elips II, Jakarta.
- Situmorang, Victor M, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, 2006, *penelitian hukum normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, DJambatan, Jakarta.
- Untung, Budi, 2001, *Visi Global Notaris*, ANDI, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2009, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Farum Sahabat, Jakarta.
- Widiyono, Tri, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia, Jakarta.
- Yahya, M. Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Artikel, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), JURNAL, dan**

### **Sumber Lain**

- Indrajab, Fidwal, 2014, *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Tesis, prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Matra, Agung Fajar, 2012, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok.

- Muntinah, 2010, “*Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*”. Thesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Adiningsih, Ni Komang Nea, 2019, “*Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan*”, *Kertha Semaya* , Vol. 7 No. 6, ojs.unud.ac.id,  
URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52497/30981>, Diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 04.00 WIB.
- Mochamad Januar Rizki, (2020, Maret 26), “*Melihat Sistem e-Proxy Di RUPS Emiten Pasar Modal*”, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-sistem-e-proxy-di-rups-emiten-pasar-modal-lt5e7c2a9f6151f/?page=3>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 21.17 WIB.
- Florenshia, 2021, “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dlama Era Cyber Notary*”, jurnal ilmiah, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ikhsan Lubis, 2021, “*Tranformasi Digital Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas*”, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, Volume 8, Nomor 2, Universitas Medan Area, Medan.
- Iqbal, Muhammad, 2022, “*Kepastian Hukum Akta E-RUPS Yang Dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*”, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan: Volume 11 Nomor 1, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Putra, Merdi Aditya, 2022, “*Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang dilaksanakan Secara Elektronik*”, Jurnal Ilmiah, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Puspitaningrum, Jayanti, 2018, “*Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Media Telekonferensi*”, Jurnal Ilmiah, Legal Pluralism: Volume 8 Nomor 2. Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua.
- Rizal, Muhammad Aulia, 2021, “*Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonfrensi*”, Jurnal Ilmiah, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.

Rossalina, Zainatun, 2016, "*Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai  
Politik.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak  
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan  
Tanah.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  
Fidusia.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  
Menjadi Undang-Undang. .  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor  
16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang  
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 Tentang  
Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham  
Perusahaan Terbuka.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6032.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 tentang  
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran  
Badan Hukum Perseroan Terbatas.